



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SABANG
UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IRAWADI,
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 403589

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.767.700.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/95 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 809.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 351 m2/176 m2 di KAB / KOTA KOTA SABANG , HASIL SENDIRI Rp. 780.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 2 m2/2 m2 di KAB / KOTA KOTA SABANG , HASIL SENDIRI Rp. 58.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/600 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 120.700.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 91.000.000

1. MOBIL, TOYOTA / MINI BUS RUSH 1 Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, HONDA HONDA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOTOR, HONDA HONDA Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 68.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 28.691.738

F. HARTA LAINNYA Rp. ----



Sub Total	Rp.	1.955.391.738
III. HUTANG	Rp.	132.870.201
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.822.521.537

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SABANG

UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FAKHRI KAMAL
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 866585

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 420.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 232 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA SABANG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 3.048 m2 di KAB / KOTA KOTA SABANG , HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 128.000.000

1. MOTOR, HONDA F1C02N28LD AT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
2. MOTOR, HONDA MF125 SD. Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOBIL, TOYOTA MINI BUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 58.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 886.522

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 606.886.522

III. HUTANG Rp. 53.396.945

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 553.489.577

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SABANG
UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : M. NASIR
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 621545

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.540.000.000

1. Tanah Seluas 192 m2 di KAB / KOTA KOTA SABANG , HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. Tanah Seluas 120 m2 di KAB / KOTA KOTA SABANG , HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
3. Tanah Seluas 103 m2 di KAB / KOTA KOTA SABANG , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 219 m2/184 m2 di KAB / KOTA KOTA SABANG , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 170.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU F700RG-TXMT/ MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOTOR, HONDA EIF02NIM2. A/T/ SPD MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
3. MOTOR, HONDA HONDA Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
4. MOTOR, YAMAHA BBPA/T/SEPEDA MOTOR Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	8.973.767
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.718.973.767
III. HUTANG	Rp.	22.083.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.696.890.767

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SABANG
UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MASPRIYONO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 407091

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	22.200.000
1. MOTOR, HONDA NF125 TRF Tahun 2007, HADIAH Rp. 2.400.000		
2. MOTOR, HONDA L1K02Q33L1 AT/SOLO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 19.800.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	291.698
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	22.491.698
III. HUTANG	Rp.	----
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	22.491.698

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SABANG
UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EVA SASWITA
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 903426

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	14.000.000
1. MOTOR, HONDA X1H02N35M1 A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI		
Rp. 14.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	11.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	20.243.321
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	45.743.321
III. HUTANG	Rp.	218.387.717
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-172.644.396

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SABANG

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN
UNIT KERJA : MENENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ABDUL ROHIM
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 902453

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 40.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 224 m2/89 m2 di KAB / KOTA KOTA SABANG , HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 39.500.000

1. MOTOR, HONDA X1H02N35M1 A/T / SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
2. MOTOR, HONDA NF100 LD Tahun 2004, HIBAH TANPA AKTA Rp. 3.500.000
3. MOTOR, HONDA NC11A3C A/T Tahun 2011, HADIAH Rp. 1.000.000
4. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 1987, HASIL SENDIRI Rp. 26.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 7.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 2.312.930

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 186.165

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 89.499.095

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 89.499.095

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.